

## **Analisis Aksesibilitas *Website* Kementerian di Indonesia Sebagai Implementasi dari *E-Government***

**Dini Tri Lestari<sup>1</sup>, Hanny Hafiar<sup>2</sup>, Centurion Chandratama Priyatna<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjajaran, Sumedang, Indonesia

<sup>1</sup>dini20001@mail.unpad.ac.id

### **ABSTRAK**

Perkembangan di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK di Indonesia terus mengalami peningkatan. Keadaan tersebut mendorong pemerintah untuk mengadaptasi teknologi digital ke dalam pelayanan publik dengan penerapan *e-government*. Salah satu implementasi dari *e-government* yaitu melalui pengelolaan *website*. Namun, tidak semua publik dapat menikmati akses informasi melalui *website* dengan mudah. Ada kalangan yang tidak dapat menikmati informasi dikarenakan keterbatasan yang dimilikinya, yaitu kalangan disabilitas. Sebagian besar *website* dari kementerian-kementerian di Indonesia masih belum memiliki fitur aksesibilitas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat aksesibilitas *website* kementerian-kementerian di Indonesia serta pentingnya memastikan bahwa *website* tersebut dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis isi dengan pendekatan kuantitatif. Evaluasi dilakukan dengan alat otomatis aXe DevTools dari Deque dan berpedoman pada pedoman aksesibilitas *website* WCAG atau *web content accessibility guidelines*. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum kementerian-kementerian di Indonesia masih belum memperhatikan kepentingan aksesibilitas pada *website*-nya sehingga peninjauan ulang terhadap aksesibilitas *website* perlu untuk dilakukan.

Kata Kunci: aksesibilitas; *website*; *e-government*

### **ABSTRACT**

*Developments in the field of technology, information, and communication, or TIK in Indonesia continue to increase. This situation encourages the government to adopt digital technology into public services by implementing e-government. One of the implementations of e-government is through website management. However, not all the public can easily access information through the website. Some people cannot enjoy information due to their limitations, namely people with disabilities. Most websites from ministries in Indonesia still do not have accessibility features. Therefore, this research aims to evaluate the level of accessibility of the websites of ministries in Indonesia and the importance of ensuring that the website can be accessed by all groups, including people with disabilities. The research method used is the content analysis method with a quantitative approach. The evaluation was conducted with Deque's aXe DevTools automated tool and guided by the WCAG website accessibility guidelines or web content accessibility guidelines. The evaluation results show that in general, ministries in Indonesia still do not pay attention to the importance of accessibility on their websites so a review of website accessibility needs to be conducted.*

*Keywords: accessibility; website; e-government*

## A. Pendahuluan

Perkembangan di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK di Indonesia terus mengalami peningkatan. Salah satu yang mengindikasikan hal tersebut adalah meningkatnya jumlah pengguna internet. Hasil pendataan Survei Susenas 2022, sebanyak 62,10 persen di tahun 2021 kemudian meningkat menjadi 66,48 persen di tahun 2022 (BPS, 2023). Hasil survei terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024 juga menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia mengalami peningkatan menjadi 79,5% atau setara dengan 221.563.479 jiwa dari total populasi 278,6 juta jiwa (Humas Kominfo, 2024). Adapun aktivitas yang dilakukan oleh mayoritas pengguna internet adalah untuk *finding information* atau menemukan informasi (datareportal, 2024).

Keadaan tersebut mendorong pemerintah untuk mengadaptasi teknologi digital ke dalam pelayanan publik dengan penerapan *e-government*. *E-government* atau Electronic-

*government* merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada publik (Lenak et al., 2021). Hal ini diatur dalam Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* yang mengamanatkan setiap lembaga negara untuk mengembangkan *e-government* sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien (INPRES NO 3 TAHUN 2003, n.d.).

Salah satu implementasi dari *e-government* yaitu melalui pengelolaan *website*. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Portal dan Situs Web Badan Pemerintahan, bahwa dalam rangka penata kelolaan *e-government*, optimalisasi layanan publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan oleh Badan

Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang

Penyelenggaraan Portal dan Situs Web Badan Pemerintahan (Menteri Komunikasi dan Informatika RI, 2017). Berdasarkan hal tersebut, kementerian-kementerian di Indonesia sebagai bagian dari badan pemerintahan telah memiliki *website* resminya masing-masing.

Implementasi *e-government* tersebut seharusnya diwujudkan dengan optimalnya pelayanan publik dan cepatnya penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan oleh Badan Pemerintahan. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua kalangan memiliki aksesibilitas yang sama terhadap hal tersebut. Salah satunya penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap individu yang menghadapi keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensori dalam jangka panjang yang dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya (Azzahra, 2020).

Berdasarkan data berjalan 2020

dari Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta atau sekitar lima persen dari total populasi (dalam Kemensos RI, 2020). Angka tersebut cukup besar dan wajib menjadi perhatian bagi pemerintah, ditambah lagi hal tersebut sudah diatur dalam Inpres nomor 3 tahun 2003.

Kementerian-kementerian di Indonesia sebagai salah satu instansi pemerintahan juga memiliki kewajiban dalam mengimplementasikan *e-government*.

Namun, dalam implementasinya, dari total 34 *website* kementerian di Indonesia, hanya 12 *website* kementerian yang memiliki fitur aksesibilitas. Artinya, lebih dari 64 persen *website* kementerian di Indonesia masih belum memiliki fitur aksesibilitas sehingga memiliki potensi yang besar menjadi *website* yang tidak *aksesible*.

Menurut W3C, *website* yang *aksesible* adalah ketika situs dan sarana web didesain dan kodenya ditulis dengan baik, para penyandang disabilitas akan bisa

menggunakan situs dan sarana tersebut. Sayangnya, saat ini banyak situs dan sarana web yang memiliki hambatan aksesibilitas dan membuatnya menjadi sulit atau bahkan tidak bisa digunakan oleh beberapa orang (W3C, 2023).

Untuk memastikan aksesibilitas dari *website*, diperlukan standar yang menjadi acuan apakah sebuah *website* *aksesible* bagi setiap orang. *World Wide Web Consortium* atau W3C, adalah sebuah organisasi independen internasional yang meluncurkan standar universal sebagai pedoman dan standar bagi *website* untuk memastikan aksesibilitasnya (W3C, 2024a).

Pedoman aksesibilitas *website* yang digunakan dikenal dengan singkatan WCAG atau web content accessibility guidelines. WCAG merupakan pedoman yang terdiri atas peraturan-peraturan dalam memberikan spesifikasi terkait pengembangan *website* yang *aksesible* dan dapat diterapkan oleh seluruh *website* di dunia (W3C, 2024b). WCAG telah mengalami perubahan dan pengembangan beberapa kali. WCAG 1.0 adalah

versi WCAG pertama yang diluncurkan pada 1999, lalu WCAG 2.0 pada 2008 dan 10 tahun kemudian terjadi pengembangan menjadi WCAG 2.1 dengan menambahkan kriteria baru terkait aksesibilitas *website*. WCAG 2.1 memiliki empat prinsip dan diturunkan menjadi 78 kriteria panduan standar aksesibilitas *website* (W3C, 2024b).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisis evaluasi terhadap aksesibilitas *website* resmi kementerian-kementerian di Indonesia dengan menggunakan standar WCAG 2.1 sebagai acuan aksesibilitas *website*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi aksesibilitas *website* kementerian melalui total pelanggaran aksesibilitas, klasifikasi isu, jenis eror, dan juga jenis disabilitas yang terpengaruh dari pelanggaran aksesibilitas yang ditemukan. Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kesimpulan secara umum mengenai kondisi aksesibilitas *website* kementerian-kementerian di Indonesia sebagai wujud

implementasi dari *e-government*.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan kuantitatif. Analisis isi kuantitatif menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan, di mana hasil penelitian dianggap merupakan representasi dari seluruh populasi (Sari & Tarigan, 2022).

Dalam mengevaluasi aksesibilitas *website*, peneliti memanfaatkan alat evaluasi otomatis untuk mengumpulkan data dan mengevaluasi aksesibilitas *website*.

Alat evaluasi yang digunakan sudah sesuai dengan standar yang diakui secara umum yaitu WCAG, dengan WCAG 2.1 sebagai acuan utama. Alat yang digunakan tersebut adalah aXe DevTools oleh Deque. Alat ini dapat diakses secara gratis dan dapat mengelompokkan hasil evaluasi aksesibilitas *website* menjadi 4 kategori, yaitu *critical*, *serious*, *moderate*, dan *minor* (Deque, 2022). Dalam menggunakan alat ini, terlebih dahulu peneliti harus

mengunduh software sebagai ekstensi browser, navigasi halaman *website* yang akan dievaluasi, dan dalam hitungan menit saja peneliti secara langsung bisa mendapatkan hasil analisis aksesibilitas secara otomatis dari *website* yang akan dievaluasi.

Peneliti menggunakan aXe DevTools untuk mengumpulkan data pelanggaran dari 21 *website* resmi kementerian-kementerian di Indonesia. Indonesia memiliki total kementerian sebanyak 34 kementerian, namun peneliti hanya akan menganalisis aksesibilitas *website* dari 21 kementerian saja. Hal tersebut dikarenakan terdapat 12 kementerian yang sudah memiliki fitur aksesibilitas sehingga tidak perlu lagi melakukan pengujian aksesibilitas serta alat pengujian aksesibilitas juga tidak dapat bekerja pada *website* yang sudah memiliki fitur aksesibilitas. Selain itu terdapat 1 *website* kementerian yang tidak dapat peneliti akses atau terjadi eror saat proses penelusuran *website* sehingga tidak dapat dilakukan evaluasi terhadap *website* tersebut.

Ada beberapa tahapan yang

dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data penelitian, yaitu:

- (1) mengumpulkan URL *website* resmi kementerian-kementerian di Indonesia;
- (2) memilih dan menggunakan standar WCAG 2.1 dan aXe DevTools sebagai alat evaluasi aksesibilitas;
- (3) menginput data secara statistik menggunakan Microsoft Excel dan

melakukan pengelompokan data dengan kategori: *critical*, *serious*, *moderate*, dan minor kemudian dilanjutkan dengan pengelompokan jenis pelanggaran;

- (4) melakukan penarikan kesimpulan dari hasil data yang sudah diolah dan dipaparkan secara deskriptif sebagai hasil dari penelitian.

**Tabel 1. Daftar Website Kementerian di Indonesia**

No.	Kementerian	Website	Fitur Aksesibilitas
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	<a href="https://polkam.g">https://polkam.g</a>	Ada
2	Kementerian Agama	<a href="https://kemenag.go.id/">https://kemenag.go.id/</a>	Ada
3	Kementerian Sosial	<a href="https://kemensos.go.id/">https://kemensos.go.id/</a>	Ada
4	Kementerian Perdagangan	<a href="https://www.kemendag.go.id/">https://www.kemendag.go.id/</a>	Ada
5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<a href="https://www.pu.go.id/">https://www.pu.go.id/</a>	Ada
6	Kementerian Komunikasi dan Informatika	<a href="https://www.kominfo.go.id/">https://www.kominfo.go.id/</a>	Ada
7	Kementerian Pertanian	<a href="https://www.pertanian.go.id/">https://www.pertanian.go.id/</a>	Ada
8	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<a href="https://kkp.go.id/">https://kkp.go.id/</a>	Ada
9	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	<a href="https://www.atrbpn.go.id/">https://www.atrbpn.go.id/</a>	Ada
10	Kementerian BUMN	<a href="http://www.bumn.go.id/">http://www.bumn.go.id/</a>	Ada
11	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<a href="https://kemenparekraf.go.id/">https://kemenparekraf.go.id/</a>	Ada
12	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<a href="https://www.kempppa.go.id/">https://www.kempppa.go.id/</a>	Ada
13	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	<a href="https://ekon.go.id/">https://ekon.go.id/</a>	Tidak ada
14	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	<a href="http://www.kemenkopmk.go.id/">http://www.kemenkopmk.go.id/</a>	Tidak ada
15	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	<a href="https://maritim.go.id/">https://maritim.go.id/</a>	Tidak ada
16	Kementerian Sekretaris Negara	<a href="https://www.setneg.go.id/">https://www.setneg.go.id/</a>	Tidak ada
17	Kementerian Dalam Negeri	<a href="https://www.kemendagri.go.id/">https://www.kemendagri.go.id/</a>	Tidak ada
18	Kementerian Luar Negeri	<a href="https://kemlu.go.id/">https://kemlu.go.id/</a>	Tidak ada
19	Kementerian Pertahanan	<a href="https://www.kemhan.go.id/">https://www.kemhan.go.id/</a>	Tidak ada
20	Kementerian Hukum dan HAM	<a href="https://www.kemenkumham.go.id/">https://www.kemenkumham.go.id/</a>	Tidak ada
21	Kementerian Keuangan	<a href="https://www.kemenkeu.go.id/">https://www.kemenkeu.go.id/</a>	Tidak ada
22	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	<a href="https://www.kemdikbud.go.id/">https://www.kemdikbud.go.id/</a>	Tidak ada
23	Kementerian Kesehatan	<a href="https://www.kemkes.go.id/">https://www.kemkes.go.id/</a>	Tidak ada
24	Kementerian Ketenagakerjaan	<a href="https://www.kemnaker.go.id/">https://www.kemnaker.go.id/</a>	Tidak ada
25	Kementerian Perindustrian	<a href="https://www.kemenperin.go.id/">https://www.kemenperin.go.id/</a>	Tidak ada



26	Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral	<a href="https://www.esdm.go.id">https://www.esdm.go.id</a>	Tidak ada
27	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<a href="http://www.menlhk.go.id">http://www.menlhk.go.id</a>	Tidak ada
28	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	<a href="https://www.kemendesa.go.id/">https://www.kemendesa.go.id/</a>	Tidak ada
29	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	<a href="https://www.bappenas.go.id/">https://www.bappenas.go.id/</a>	Tidak ada
30	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	<a href="https://www.menpan.go.id/">https://www.menpan.go.id/</a>	Tidak ada
31	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	<a href="https://kemenkopukm.go.id/">https://kemenkopukm.go.id/</a>	Tidak ada
32	Kementerian Pemuda dan Olahraga	<a href="http://www.kemenpora.go.id/">http://www.kemenpora.go.id/</a>	Tidak ada
33	Kementerian Investasi/BPKM	<a href="https://www.bkpm.go.id/">https://www.bkpm.go.id/</a>	Tidak ada
34	Kementerian Perhubungan	<a href="http://dephub.go.id/">http://dephub.go.id/</a>	Tidak ada

Sumber: Data Peneliti, 2024

### C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil evaluasi 21 *website* kementerian yang telah peneliti lakukan, terdapat pelanggaran yang telah melanggar panduan aksesibilitas *website* WCAG 2.1. Berikut merupakan total pelanggaran aksesibilitas 21 *website* kementerian di Indonesia:

**Tabel 2. Total Pelanggaran Aksesibilitas**

Jumlah <i>Website</i>	Total Pelanggaran	Rerata	Maks.	Min.
21	1098	52,3	197	1

Sumber: Analisis Aksesibilitas oleh Peneliti, 04 Mei 2024

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, aXe DevTools membagi pelanggaran-pelanggaran tersebut menjadi 4 kategori *issues*. Kategori ini dibagi dengan tujuan agar dapat memberikan level urgensi pada setiap pelanggaran yang dilakukan

kepada pengelola *web* dan konten. Dari 1098 total pelanggaran, berikut merupakan kategori *issues* pelanggaran aksesibilitas *website* kementerian-kementerian di Indonesia:

**Tabel 3 Kategori Issues Pelanggaran Aksesibilitas Website Kementerian di Indonesia**

Kategori <i>issues</i>	Jumlah pelanggaran berdasarkan kategori	Rerata pelanggaran berdasarkan kategori	Jumlah <i>website</i> berdasarkan kategori
<i>Critical</i>	196	9,33	16
<i>Serious</i>	902	42,95	21
<i>Moderate</i>	0	0	0
<i>Minor</i>	0	0	0

Sumber: Analisis Aksesibilitas oleh Peneliti, 2024

Berdasarkan kategori *issues* dari 21 *website* kementerian di Indonesia, menunjukkan bahwa *website* kementerian-kementerian di Indonesia masih memiliki pelanggaran-pelanggaran

aksesibilitas yang akan menghambat penyandang disabilitas dalam mengakses informasi. Dari hasil tersebut, penulis menilai bahwa kementerian-kementerian di Indonesia masih belum sepenuhnya fokus pada kepentingan penyandang disabilitas. Pelanggaran yang ditemukan berada pada kategori *critical* dan *serious*, di mana dalam hal ini memiliki tingkat urgensi yang tinggi dan seharusnya menjadi prioritas bagi kementerian-kementerian untuk segera menangani layanan *website*-nya sebagai wujud dari implementasi *e-government*, dalam hal ini memastikan agar seluruh kalangan memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses informasi.

Pelanggaran-pelanggaran yang telah dikategorikan sebelumnya, terdiri dari jenis-jenis eror yang melanggar kriteria yang terdapat dalam WCAG 2.1 Jenis eror yang ditemukan di setiap *website* dapat berbeda-beda, walaupun pelanggaran yang ditemukan pada *website* berada

dalam kategori yang sama.

Peneliti menemukan 23 jenis eror aksesibilitas pada 21 *website* kementerian di Indonesia yang merupakan akumulasi dari pelanggaran dari setiap *website*, bukan dari jenis eror yang ada pada seluruh *website*. Hal tersebut menimbulkan perbedaan dalam jumlah *website* dari setiap jenis pelanggaran yang dilakukan dikarenakan tidak semua *website* memiliki pelanggaran yang sama. Berikut merupakan jenis eror dari 21 *website* kementerian yang ada di Indonesia:



**Tabel 1.4 Jenis Eror Aksesibilitas oleh Setiap Website Kementerian di Indonesia**

No.	Jenis Pelanggaran	Total	Rata-rata	Jumlah website
1	<i>Buttons must have Discernible text</i>	68	6,18	11
2	<i>Elements must have meet minimum color contrast ratio thresholds</i>	345	21,56	16
3	<i>Frames must have an accessible name</i>	24	3	8
4	<i>Images must have alternate text</i>	100	6,67	15
5	<i>Form elements must have labels</i>	3	1	3
6	<i>Links must have discernible text</i>	431	23,94	18
7	<i>&lt;marquee&gt; elements are deprecated and must not be used</i>	5	1,25	4
8	<i>ARIA input fields must have an accessible name</i>	3	1,5	2
9	<i>Certain ARIA roles must contain particular children</i>	11	1,57	7
10	<i>Certain ARIA roles must be contained by particular parents</i>	12	4	3
11	<i>&lt;li&gt; elements must be contained in a &lt;ul&gt; or &lt;ol&gt;</i>	22	4,4	5
12	<i>Zooming and scaling must not be disabled</i>	2	1	2
13	<i>Elements must only use permitted ARIA attributes</i>	39	6,5	6
14	<i>ARIA attributes must conform to valid values</i>	3	1,5	2
15	<i>Elements must only use supported ARIA attributes</i>	1	1	1
16	<i>&lt;ul&gt;and &lt;ul&gt; must only directly contain &lt;li&gt;,&lt;script&gt; or &lt;template&gt; elements</i>	3	1	3
17	<i>&lt;html&gt; element must have a lang attribute</i>	3	1	3
18	<i>input bottons must have discernible text</i>	1	1	1
19	<i>Scrollable region must have keyboard access</i>	4	2	2
20	<i>ARIA roles used must conform to valid values</i>	1	1	1
21	<i>ARIA progressbar nodes must have an accesible name</i>	2	1	2
22	<i>Links must be distinguishab le without relying on color</i>	4	2	2
23	<i>ARIA hidden element must not be focusable or contain focusable elements</i>	11	11	1

Sumber: Analisis Aksesibilitas oleh Peneliti, 2024

Peneliti menemukan 3 jenis eror yang telah dilanggar sama atau besar dari 100 kali, yaitu (1) *Elements must have meet minimum color contrast ratio thresholds* atau elemen harus memenuhi ambang batas rasio kontras warna minimum, sebanyak 345 kali, (2) *Images must have alternate text* atau gambar harus memiliki teks alternatif, sebanyak 100 kali, dan (3) *Links must have discernible text* atau tautan harus memiliki teks yang dapat dilihat, sebanyak 431

kali. Setiap dari jenis eror tersebut diketahui akan mempengaruhi aksesibilitas dari penyandang disabilitas dengan kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda pula.

Dengan jumlah penyandang disabilitas yang cukup besar di Indonesia, seharusnya isu aksesibilitas ini menjadi prioritas yang perlu untuk diperhatikan oleh instansi pemerintah dalam hal ini kementerian.

Para penyandang disabilitas

juga memiliki hak untuk memperoleh akses terhadap informasi (JatengProv, 2024). Namun, berdasarkan hasil temuan peneliti, peneliti menilai bahwa kementerian- kementerian di Indonesia sebagian besar masih belum maksimal dalam menjalankan kebijakan yang ada. Kondisi aksesibilitas *website* kementerian-kementerian di Indonesia menunjukkan bahwa kementerian sebagai instansi pemerintah belum mengimplementasikan *e-government* yang baik sesuai dengan yang berlaku pada Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* ke dalam aktivitas digitalnya. Diperlukan kesadaran dan pemahaman dari pihak yang bertanggungjawab dalam mengelola *website* kementerian untuk perlu memperhatikan isu aksesibilitas ini.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai aksesibilitas 21 *website* kementerian di Indonesia, diketahui bahwa kementerian-

kementerian di Indonesia mayoritas masih belum memperhatikan kepentingan aksesibilitas pada *websitenya*. Hal ini ditunjukkan dengan total pelanggaran aksesibilitas sebanyak 1098 pelanggaran aksesibilitas. Sedangkan untuk kategori isu pelanggaran aksesibilitas dari 21 *website* kementerian di Indonesia ditemukan memiliki pelanggaran dalam dua kategori yaitu, *critical* dan *serious*. Jenis eror aksesibilitas ditemukan sebanyak 23 jenis eror yang dilanggar berdasarkan kriteria WCAG 2.1.

Peneliti menilai bahwa dengan penemuan pelanggaran tersebut mengindikasikan bahwa kementerian- kementerian di Indonesia masih belum memaksimalkan kebijakan yang ada serta para pihak yang berkaitan dengan pengelolaan *website* perlu untuk menyadari dan memahami dengan baik pentingnya aksesibilitas dalam pengelolaan *website*.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian ini peneliti merekomendasikan peninjauan ulang dalam pengelolaan *website*

perlu untuk dilakukan guna memastikan informasi yang ada pada *website* dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Diharapkan kementerian-kementerian di Indonesia sebagai instansi pemerintah dapat menerapkan kebijakan negara dengan lebih optimal mengenai aksesibilitas agar *website* dapat menjadi salah satu sumber informasi utama bagi semua kalangan tanpa terkecuali

## REFERENSI

- Azzahra, A. (2020). *Efforts To Equitable Education For Children With Intellectual Disabilities As An Alternative To Overcoming Social Problems In Children*. *Journal Of Creativity Student*, Vol. 5(1)(Social Problems), 65– 86.
- BPS. (2023). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022*.
- Datareportal. (2024). *Digital 2024 April Global Statshot Report*.
- Deque. (2022). *Issue Impacts*. Humas Kominfo. (2024). *Pengguna Internet Meningkat, Kominfo Galang Kolaborasi Tingkatkan Kualitas Layanan*. *Inpres No 3 Tahun 2003*. (N.D.). *Jatengprov. (2024). Kaum Difabel Harus Mendapat Hak Dan Kesempatan Sama*.
- Kemensos RI. (2020). *Kemensos Dorong Aksesibilitas Informasi Ramah Penyandang Disabilitas*.
- Lenak, S., Sumampow, I., & Waworundeng, W. (2021). *Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon*. *Jurnal Governance*, Vol.1, No. 1.
- Menteri Komunikasi Dan Informatika RI. (2017). *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Portal Dan Situs Web Badan Pemerintahan*.
- Sari, F., & Tarigan, T. (2022). *Metode Analisis Dalam Media Sosial*. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (Jikem)*.
- W3C. (2023). *Pengenalan Ke Aksesibilitas Web*.
- W3C. (2024a). *About Us*.
- W3C. (2024b). *WCAG 2 Overview*.